

## Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Oktiani Perida Merang<sup>1\*</sup>, Ice Anugrah Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Malinau, Jl. Ladang Malinau Seberang Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Jl. Jabal Nur No. 1. Palu, Sulawesi Tengah

\*Email: [oktianiperida5@gmail.com](mailto:oktianiperida5@gmail.com)

Artikel diterima : 05 Februari 2024 Revisi diterima 06 Maret 2024

### ABSTRACT

The role of customary forest management bodies and customary institutions in forest resource management is very necessary because it acts as a supervisor and law enforcer of regulations and policies in maintaining the sustainability of forest resources. This research purposes were to elaborate and explain the institutional potential of the community in the management of Tana Ulen customary forest in Long Alango Village. This research used a case study method where data was collected through interviews and field observations. The results of the study showed that the existence of customary forest management agencies and customary institutions were able to control communities around the forest and individuals from outside not to encroach on forest products without permits. The use of natural resources in customary forest areas could be utilized in a limited manner so that forest functions could be enjoyed by future generations. The existence of customary forests with an area of 11,000 hectares which was included in the traditional customary forest zone of Kayan Mentarang National Park was an advantage for the community because the Tana Ulen customary forest management agency had collaborated with the Kayan Mentarang National Park Agency which had a joint responsibility to conserve the natural resources in the area, so it was likely to be protected from land use change. The institutional potential of the people of Long Alango Village illustrates the fighting spirit in preserving natural resources contained in customary forest areas.

**Keyword:** Customary forest, institutional, local community.

### ABSTRAK

Peran badan pengelola hutan adat maupun lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan sangat diperlukan karena berperan sebagai pengawas dan penegak hukum terhadap peraturan dan kebijakan dalam mempertahankan kelestarian sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Tana Ulen di Desa Long Alango. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keberadaan Badan pengelola hutan adat beserta lembaga adat mampu mengendalikan masyarakat sekitar hutan maupun oknum dari luar untuk tidak melakukan perambahan hasil hutan tanpa izin. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam kawasan hutan adat dapat dimanfaatkan secara terbatas sehingga fungsi hutan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keberadaan hutan adat dengan luas 11.000 hektar yang masuk dalam zona hutan adat tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat karena Badan pengelola hutan adat Tana Ulen telah berkolaboratif dengan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikan sumber daya alam yang ada dalam kawasan, sehingga besar kemungkinan terlindung dari alih fungsi lahan. Potensi kelembagaan masyarakat Desa Long Alango menggambarkan semangat juang dalam melestarikan sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan hutan adat.

**Kata kunci:** Hutan adat, kelembagaan, masyarakat lokal.

### PENDAHULUAN

Hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem hutan adat yang merupakan hutan primer di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu menyimpan berbagai

keanekaragaman hayati dan memiliki potensi sumberdaya alam berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu (HHNK) yang begitu melimpah untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Melihat nilai hutan yang memiliki multi fungsi tersebut maka pengelolaan hutan yang bijaksana setidaknya harus memenuhi keserasian dan keselarasan ketiga nilai yaitu nilai ekonomis, ekologis, dan sosial budaya atau yang dikenal dengan pengelolaan hutan berkelanjutan

(Sustainable Forest Management) seperti dirumuskan oleh ITTO 1992 (Mardiatmoko, 2008).

Masyarakat disekitar kawasan merupakan masyarakat adat dimana hukum adat menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Lembaga hukum adat memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami adat yang mengatur kegiatan mereka sehari-hari, sehingga masyarakat selalu berpedoman pada lembaga hukum adat dalam pengambilan keputusan (Farida, 2014). Menurut Norsidi (2019), masyarakat memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu hutan larangan yang merupakan hutan ulayat dimana seluruh isinya tidak boleh dimanfaatkan, sesap yaitu karet dan belukar, dan yang ketiga yaitu kawasan hutan pemanfaatan non kayu.

Long Alango adalah salah satu desa terpencil di kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Keberadaan hutan hujan tropis dengan luas 11.000 hektar yang merupakan hutan adat sangat penting untuk warga di Desa Long Alango. Selanjutnya Anyie Apuy menyebutkan bahwa kelestarian kawasan hutan adat yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati tersebut juga merupakan "harga mati" bagi kepala Adat Besar Bahau Hulu, Anyie Apuy. Kalau hutan habis, manusia akan binasa kata Anyie Apuy, bapak dari 12 anak ini, pria veteran pejuang konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1965 saat ditemui di Samarinda Kalimantan Timur (Apuy. A, 2014).

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memiliki pengalaman dan pengetahuan secara turun temurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di sekitar wilayah pemukiman mereka, seperti masyarakat Desa Long Alango sudah menerapkan pola pemanfaatan hutan yang sustainable, dengan menggunakan sistem zonasi. Kawasan hutan adat Desa Long Alango memiliki nilai kearifan lokal yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini.

Menurut Zulkarnain & Febrimansyah (2008), Kearifan lokal berupa prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi maupun berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam sebuah sistem kelembagaan secara kultural.

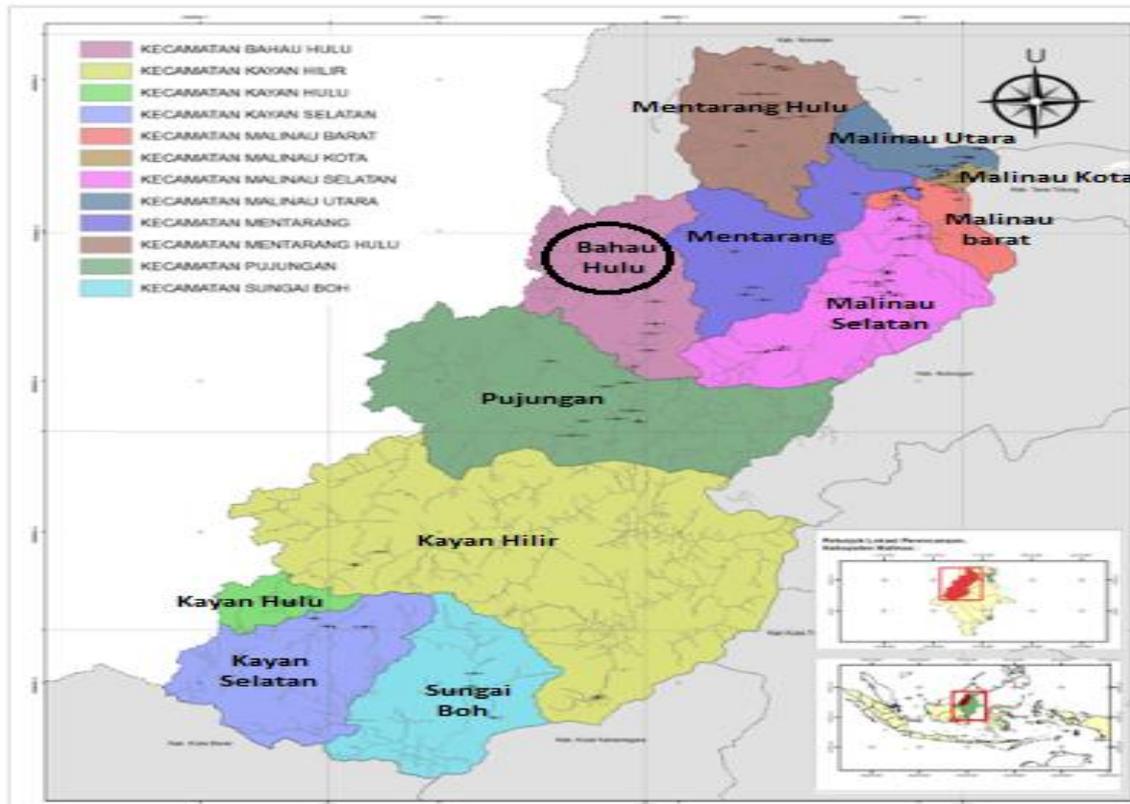
Komunitas masyarakat adat merupakan faktor utama dan penentu atas hadirnya produk hukum yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak (Arizona, Malik, & Irena Lucy Ishimora, 2017). Menurut Suardi et al. (2016), bahwa akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi kelembagaan ditingkatkan, karena lembaga tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan ketergantungan yang kuat. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di wilayah Desa Long Alango. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam membuat suatu rekomendasi untuk mengelola hutan adat secara adil, sejahtera dan berkelanjutan, sehingga kawasan hutan adat dapat dilestarikan sehingga bisa bermanfaat bagi semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023. Desa Long Alango memiliki luas wilayah 21.667,52 ha/216,67 km<sup>2</sup>, dengan kode wilayah 65.02.11.2002. Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

Wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 12 Kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Bahau Hulu yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Long Alango.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.



Gambar 2. Citra Satelit Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu

### Prosedur Penelitian

Pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuisisioner yang melibatkan 30 responden. Pemilihan sampel (informan kunci) dilakukan

dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018).

Dalam metode ini, penentuan 30 responden dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan juga instansi pemerintah Desa setempat, instansi Taman Nasional Kayan Mentarang, instansi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola hutan adat

serta kepala adat dan pemuda adat guna melengkapi hasil kuisioner. Penentuan jumlah responden ditentukan berdasarkan batas minimal dari suatu penelitian sosial yaitu 30 orang (Singarimbun, 2006).

### **Analisis Data**

Untuk mengetahui potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Desa Long Alango diperoleh melalui analisis data yang dikembangkan oleh (Schmid, 1987), dengan menggunakan kerangka pendekatan yaitu:

1. Situasi, dimana situasi terdiri dari berbagai analisis terhadap sumber daya alam yang ada.
2. Struktur, terdiri dari (1) Batasan terhadap berbagai partisipasi pemangku kepentingan; (2) Lingkup aksi interaksi masyarakat dan sumber daya alam yang ada; (3) distribusi kewenangan antar berbagai pemangku kepentingan; (4) Keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; (5) Aturan-aturan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan; (6) Penghargaan dan sanksi terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut.
3. Perilaku, terdiri dari Pilihan-pilihan keputusan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi akibat pilihan terhadap keputusan-keputusan pengelolaan yang dilakukan dan perilaku yang berdampak terhadap sumber daya alam tersebut
4. Kinerja, terdiri dari gambaran kesejahteraan atas pengelolaan sumber daya alam tersebut, kesempatan kerja bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam tersebut, perkembangan, dan efisiensi dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Long Alango memiliki luas wilayah 21.667,52 ha/216,67 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 632 jiwa yang terdiri dari laki-laki 340 jiwa dan perempuan 292 jiwa. Sekitar tahun 1940 hutan adat atau Tana Ulen Lalut Birai desa Long Alango merupakan milik kepala adat besar Bahau Hulu yaitu Apui Njau. Pada masa itu Apui Njau mengajak masyarakat untuk menggarap sawah di sekitar sungai Alango dan pada akhirnya kepala Adat Besar Bahau Hulu menetapkan wilayah itu sebagai salah satu kawasan Tana Ulen Long Alango. Kemudian pada tahun 1960-an, oleh Anyie Apui anak dari Apui Njau, hutan adat atau

tana ulen tersebut berubah statusnya menjadi milik desa dengan sebutan nama Tana Ulen Leppo. Hingga saat ini tanah Tana Ulen Leppo dijaga dan dikelola untuk kepentingan bersama masyarakat desa Long Alango, dimana hutan adat atau Tana ulen tersebut berada dalam zona tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang. Pengelolaan hutan adat atau tana ulen ditangani oleh pihak Badan Pengurus tana ulen yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat dan diperkuat dengan adanya hukum adat.

Eghenter (2015), mengatakan hutan adat atau Tana Ulen Desa Long Alango yang ada dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih beruntung karena setidaknya bisa terlindung dari kemungkinan alih fungsi lahan, terlebih juga sudah tidak ada konflik antara masyarakat yang sejak awal tinggal di dalam kawasan taman nasional dengan pihak taman nasional. Selanjutnya disebut, kita tahu bahwa konflik antara taman nasional dengan masyarakat masih ada di taman nasional yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Mulyadi (2013), bahwa sebagian besar masyarakat adat masih mempraktikkan cara hidup dengan memanfaatkan kawasan hutan adat sebagai lahan pertanian.

Kawasan hutan adat ini selain memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, juga menyimpan potensi budaya yang menarik yaitu Kuburan Batu. Pada kawasan ini terdapat kurang lebih 50 buah kuburan batu, satu di antaranya masih berdiri utuh dengan bentuk sempurna, sementara yang lainnya memiliki tingkat keutuhan bentuk 20 - 80% saja, bahkan ada yang telah tertimbun tanah hingga terjaring oleh akar pohon di sekitar. Tidak banyak sentuhan di lokasi ini, semua terkesan alami. Pohon-pohon dengan tajuk rapat cukup meneduhkan serta lokasi yang jauh dari pemukiman membuat suasana terasa sedikit mencekam. Menurut Lagawurin (2018), Kuburan batu ini pertanda bahwa suku Dayak Kenyah dengan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang tidak terpisahkan, kami percaya warisan alam yang indah ini bukti kearifan lokal masyarakat adat kemudian Taman Nasional Kayan Mentarang hadir untuk melakukan tata kelola kawasan yang baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur adat.

Taman Nasional Kayan Mentarang dengan Luas 1,35 juta ha, ini berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia di Utara, sementara untuk tengah dan selatan, juga negara bagian Malaysia yaitu Serawak. Untuk lokasi sendiri, secara administrasi, Taman Nasional Kayan Mentarang

berada di dua kabupaten, yang keduanya ada di Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Perjalanan taman nasional yang rata-rata diawali dari cagar alam atau hutan lindung juga dialami oleh Taman Nasional Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang berada di Kalimantan Utara, dimana pada tahun 1980 Taman Nasional Kayan Mentarang mengawali keberadaannya sebagai cagar alam. Seiring berjalannya waktu dan memperhatikan situasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan maka melalui desakan dari masyarakat Suku Adat Dayak Kenyah dan juga dari instansi World Wide Fund for Nature (WWF) membuat pihak pengelola, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat akhirnya mengubah status cagar alam Kayan Mentarang menjadi Taman Nasional, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 631/Kpts-II/1996.

### **Situasi Pengelolaan Hutan Adat Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu**

Situasi pengelolaan pada hutan adat Tana Ulen ini dapat dikatakan cukup aman karena masyarakat lokal sekitar hutan maupun masyarakat luar daerah tidak diperkenankan melakukan aktivitas dalam kawasan hutan adat tanpa seizin badan pengelola. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti penangkapan hewan buruan dan penangkapan ikan pada daerah aliran sungai secara terbatas untuk kepentingan bersama namun tetap berdsarkan peraturan yang telah dibuat oleh Badan Pengelola Hutan Adat dan lembaga adat setempat bahkan diterapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Melalui lembaga Adat dan Badan pengelola hutan adat Tana Ulen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal sekitar hutan, masyarakat telah diberikan pemahaman mengenai aturan dan sanksi yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut dibuat dengan harapan agar kondisi ekosistem alam pada hutan adat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu hingga generasi yang akan datang. Sejalan dengan pendapat Ohorella (2011), menyebutkan bahwa kelembagaan menjadi sangat efektif jika aturan-aturan yang dibuat berdasarkan pemahaman, kepercayaan dan ketaatan secara menyeluruh.

Pada tahun 1994 didirikan stasiun penelitian Lalut Birai di hutan adat Long Alango. Sejak itu, Lalut Birai ibarat suatu laboratorium alam dan tempat bekerja para peneliti domestik, mancanegara, bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pelestarian alam (Apu, 2014).

Stasiun Penelitian Hutan Tropis Lalut Birai merupakan Tana Ulen milik masyarakat Adat Long Alango Kecamatan Bahau Hulu yang berada dalam zona Tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang dibawah Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah II Long Alango. Stasiun penelitian Lalut Birai menjadi laboratorium alam dan tempat bekerja para peneliti domestik, mancanegara, dan juga lembaga swadaya masyarakat pelestarian alam. Pada wilayah stasiun Lalut Birai juga sudah dilengkapi bangunan sebagai tempat tinggal para peneliti.

### **Struktur Pengelolaan Hutan Adat Desa Long Alango**

Struktur para pihak dalam pengelolaan hutan adat *Tana Ulen* ini terdiri dari 4 komponen menurut kepentingannya, yaitu:

#### *User*

Para pihak yang tergolong user atau penerima manfaat dari hutan adat Tana Ulen Desa Long Alango adalah masyarakat adat Long Alango, Masyarakat sekitar hutan, maupun pendatang dari luar, baik yang melakukan penelitian maupun juga yang melakukan perjalanan wisata. Masyarakat sekitar hutan tidak diperkenankan mengambil hasil hutan di dalam kawasan hutan Adat Tana Ulen untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan hutan adat tana ulen hanya untuk kepentingan bersama, misalnya dalam acara pesta panen, perayaan tahun baru, natalan dan acara pernikahan. Seperti yang disampaikan dalam peraturan Adat Desa Long Alango, Dungau (2016), Setiap tahun masyarakat mengadakan pesta panen dan acara-acara pernikahan, selalu kekayaan alam seperti binatang dan ikan yang ada di Tana Ulen dimanfaatkan, tergantung berapa banyak acara yang diadakan dalam 1 (satu) tahun, selain untuk kebutuhan acara tahun baru dan Natalan. Kesemuanya di atur oleh Lembaga Adat Desa Long Alango untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum/bersama. Menurut Susetyo (2014), menyatakan bahwa kelompok aktor yang memanfaatkan sumberdaya Taman Nasional berdasarkan kelembagaan informal, yaitu masyarakat setempat yang terdiri atas para penangkap ikan (nelayan), para pengambil getah jelutung, dan para pengambil kulit gemor, masyarakat setempat juga memiliki aturan (kelembagaan) informal dalam memanfaatkan sumberdaya alam, yaitu kelembagaan adat.

### *Operator*

Operator adalah lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan dalam kawasan hutan adat, seperti pengelolaan sarana-prasarana, maupun sumber daya lain. Para pihak yang tergolong operator adalah Badan pengelola hutan adat tana ulen, Lembaga Adat dan masyarakat adat Desa Long Alango serta Balai Taman Nasional Kayan Mentarang di bawah Kementerian Kehutanan.

### *Regulator*

Regulator adalah institusi pengambil keputusan atau mereka yang berwenang menetapkan kebijakan. Adapun para pihak yang tergolong regulator adalah Badan Pengelola Hutan Adat atau *Tana Ulen* desa Long Alango, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan lembaga adat.

### *Fasilitator*

Fasilitator berfungsi untuk memfasilitasi informasi, inovasi dan kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan adat kepada masyarakat adat salah satunya dengan program pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kebijakan dan menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat adat kepada pihak regulator. Fasilitator terdiri dari lembaga non pemerintah yang terdiri dari lembaga penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya *World Wide Fund for Nature (WWF)*, *Forest and climate change (ForClime)*, forum musyawarah masyarakat adat (FoMMA), Badan Pengelola hutan adat, serta toko masyarakat adat.

Koordinasi dan kerjasama diperlukan untuk menekan interdependensi antar keempat pemangku kepentingan (*user, regulator, operator, dan fasilitator*) agar dapat menjalankan program yang bersinergi dalam mengelola hutan adat secara terpadu. Melihat keberadaan hutan adat *Tana Ulen* masuk dalam zona tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang yang diatur oleh regulasi pemerintah, namun kebijakan dalam setiap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat harus melalui persetujuan badan pengelola hutan adat serta lembaga adat, sehingga pihak pemerintah baik daerah maupun pusat tidak serta merta dapat mengambil keputusan secara sepihak. Maka dari itu selalu diperlukan wadah koordinasi, pelaksanaan pengelolaan hutan adat tana ulen agar tetap ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak. Hingga kini kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh pemangku kepentingan dalam mengelola hutan adat tanah ulen Desa Long Alango sudah

tertampung dalam sebuah wadah organisasi yang baik.

### **Perilaku dalam Pengelolaan Hutan Adat Long Alango Kecamatan Bahau Hulu**

Perilaku para pihak terhadap pemanfaatan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup, secara legal formal masyarakat adat memiliki kekuatan penuh untuk mengakses sumber daya alam namun secara terbatas karena telah memiliki Badan pengelola yang mengatur segala aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta diterapkannya sanksi bagi masyarakat lokal maupun luar yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Perilaku para pihak terhadap pemanfaatan hutan adat sangat mempengaruhi kondisi hutan adat.

Masyarakat Desa Long Alango sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kehutanan dengan menggunakan kaidah kearifan lokal seperti adanya larangan membuka lahan pertanian pada kawasan hutan adat, dilarang melakukan aktivitas berburu maupun mencari hasil hutan non kayu (HHNK) tanpa seizin badan pengelola dan lembaga adat. Hal tersebut diberlakukan agar semua lapisan masyarakat dapat melindungi hutan secara lestari. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Magdalena (2013), bahwa hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Perilaku masyarakat dimana masyarakat dapat mengelola hutan adat namun dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang terbatas dengan mengikuti aturan yang berlaku. Masyarakat Desa Long Alango masih patuh terhadap aturan dan takut akan sanksi yang ada, maka dari itu masyarakat mengedepankan kepentingan ekologi yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam memandang hutan adat dibandingkan kepentingan ekonomi.

Keberadaan hutan adat yang masuk dalam zona tradisional Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) bukan berarti menjadi jaminan bahwa hutan adat Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu akan baik-baik saja, namun lebih dari itu, taman nasional adalah upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjaga ekosistem dan hewan-hewan langka tetap berkembang biak dan memiliki rumah yang aman, oleh karena itu sangat diperlukan perilaku dan peran masyarakat disekitar hutan agar senantiasa sadar akan kelestarian sumber daya alam. Dalam pengelolaan hutan adat Tana Ulen di Desa Long Alango tidak ditemui perilaku yang memperlihatkan adanya para

pemangku kepentingan yang ingin memberikan pengaruh negatif terhadap aktifitas pengelolaan hutan adat. Kinerja masyarakat dalam pengelolaan hutan adat memperlihatkan bahwa hutan adat sangat menopang kesejahteraan masyarakat adat.

### **Kinerja Pengelolaan Hutan Adat Long Alango**

Kinerja pengelolaan hutan adat atau tana ulen Long Alango sudah dapat memberikan hasil yang sangat baik terhadap kelestarian ekosistem alam dalam kawasan hutan adat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jenis flora dan fauna yang terdapat dalam kawasan hutan adat yang masih merupakan hutan primer. Dalam kawasan ini juga kondisi daerah aliran sungai (DAS) masih sangat baik, kondisi air masih jernih dan terdapat ikan yang masih dalam jumlah berlimpah. Wilayah hutan adat Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dijaga, dirawat dan dilestarikan untuk digunakan secara terbatas oleh seluruh masyarakat untuk kepentingan masyarakat adat.

Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang terlibat sebagai mitra berkolaborasi dengan Badan pengelola hutan adat tana ulen dalam mengelola hutan adat dan mendampingi kegiatan masyarakat adat. Keberadaan lembaga yang berkolaborasi tersebut mampu mengendalikan masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan kegiatan perambahan dan pembukaan lahan maupun aktivitas lainnya tanpa izin. Terlebih juga dengan diberlakukannya sanksi kepada masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah yang melakukan aktivitas didalam wilayah hutan adat, sanksi tersebut telah disepakati bersama masyarakat adat Desa Long Alango. Jenis larangan yang diberlakukan kepada masyarakat yang berada di wilayah hutan adat Tana Ulen Desa Long Alango yaitu : (1) Menebang kayu di sepanjang jalan setapak yang melintas Tana Ulen Sungai Nggeng, (2) Membuat bahan bangunan di Tana Ulen Sungai Nggeng kecuali untuk keperluan pembangunan di Sungai Nggeng, (3) Berburu di hutan adat Tana Ulen, (4) Menebang semua jenis pohon, buah-buahan hutan di Tana Ulen, (5) Berladang atau berkebun di hutan adat Tana Ulen atau membuka lahan baru (hutan rimba), (6) Merusak aset-aset seperti kuburan-kuburan batu atau kuburan kuno, (7) Mengizinkan orang luar untuk membuka lahan di Tana Ulen, (8) Membuka atau membuat jalan poros di wilayah Tana Ulen, (9) Mencari ikan di sepanjang jalur Sungai Nggeng, (10) Bagi para penelitian yang masuk wilayah Tana Ulen dilarang membawa benda-benda pulang seperti biji-bijian, batu, anggrek, dll.

Adapun sanksi Adat yang diberlakukan kepada masyarakat ataupun pendatang dari luar yang

melanggar larangan tersebut yaitu: (1) Sanksi berupa uang sebesar: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), (2) Merusak kuburan batu/situs budaya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pratiwi (2019), menyebutkan bahwa masyarakat masih patuh terhadap aturan dan takut terhadap sanksi yang ada, maka dari itu masyarakat mengedepankan kepentingan ekologi yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam memandang hutan adat dibandingkan kepentingan ekonomi. Menurut Oktoyoki (2016), kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi adat yang jelas dalam penegakkan aturan adat.

### **Potensi keterlibatan masyarakat lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat Long Alango**

Dalam perspektif kelembagaan, perlu tingkatkan aturan main baik formal maupun informal yang mengatur peran, wewenang, serta koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya di Hutan Adat *Tana Ulen* desa Long Alango. Mengacu pada Kaimuddin (2008), bahwa dalam mengelola implementasi program, pembuatan norma, aturan, dan kepemimpinan maka masyarakat membutuhkan suatu organisasi kapasitas sumberdaya yang baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan erat kaitannya dengan norma dan kekuatan nilai yang membentuk sebuah kelembagaan masyarakat hukum adat (Hamzah dkk. 2015). Pemberdayaan masyarakat telah sering dilakukan di Hutan Adat Tana Ulen Desa Long Alango, sehingga secara umum masyarakat sudah mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi kelembagaan masyarakat desa Long Alango menggambarkan semangat juang dalam melestarikan sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan hutan adat. Hal tersebut juga dapat dilihat dari tingginya inisiatif masyarakat lokal dan tingginya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi untuk mendukung dan mengembangkan kelembagaan yang kuat dan disertai dengan penguatan dari pihak pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Aisharya dkk. (2022), bahwa Keterlibatan para pihak dalam kelembagaan

mempunyai peranan penting sebagai control langsung dalam pengelolaan sumberdaya.

Zonasi dalam taman nasional kayan mentarang terdiri dari Zona inti, zona tradisional, zona rimba, Zona pemanfaatan dan zona rehabilitasi, zona budaya dan sejarah. Dalam penentuan tata batas zonasi taman nasional tidak hanya dilakukan oleh pihak balai taman nasional saja tetapi melibatkan pihak-pihak lain yang berkaitan seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Masyarakat dan Mitra Kerja. Begitu pula dalam hal pengelolaan, pihak Balai Taman Nasional tidak memiliki wewenang penuh sesuai peruntukkan (zonasi) tetapi melibatkan semua lembaga terkait untuk kerjasama dalam mengakses aktivitas kegiatan. Hingga saat ini kesepakatan-kesepakatan dalam mengelola hutan dibuat dalam suatu wadah organisasi yang tepat. Menurut Salampessy (2017), sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pengembangan kelembagaan adalah tumbuhnya kelembagaan yang tangguh, dinamis, dan berdaya saing serta mandiri dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisharya IY, Gunawana B, Abdoellaha OS, Gunawan W, Dewa JPK. 2022. Role and interaction between local actors in community-based forest management in Upper Citarum Hulu. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. doi.org/10.29244/jpsl.12.2.335-351.
- Apuy, A. 2014. <https://desalongalango.wordpress.com/2014/05/31/bumi-hijau-long-alango/#more-11>.
- Arizona, Y., Malik, & Irena Lucy Ishimora. 2017. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat : Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012. Jakarta.
- Dungau, A 2016. Peraturan Adat Desa Long Alango Tentang Pemanfaatan, Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, Situs Budaya, di Tana Ulen dan Tana Adat di Wilayah Desa Long Alango, 1-14.
- Eghenter, C. 2015. Sistem Konservasi Tradisional Tana' Ulen mampu turunkan karbon global. <https://aktual.com/sistem-konservasi-tradisional-tana-ulen-mampu-turunkan-karbon-global/>
- Farida. 2014. <https://desalongalango.wordpress.com/2014/05/30/tana-ulen-bahau-hulu/#more-8>
- Hamzah, Suhartijo D dan Istomo. 2015. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*.2(2): 116-127
- Kaimuddin. 2008. Hutan Mangrove di desa Munte Kecamatan Bone-Bone (Kajian Base Line Kelembagaan Untuk Program Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global ) Society Local Institute Study in Mangrove Forest Development at Desa Munte Kecamatan Bone-Bone ( Institute Base Line S. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*:001-110.
- Lagawurin. J, 2018. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/3029/mengua-k-misteri-kuburan-batu-di-lalut-birai-tn-kayan-mentarang.html>.
- Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur ( The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in Sesaot Village , West Nusa Tenggara and Setulang Villag. *JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121.
- Mardiatmoko, G. 2008. Konsep revitalisasi pembangunan hutan rakyat penghasil damar untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan. *Jurnal Agroforest Volume III* (2), 119-123.
- Mulyadi, M., & Pusat, J. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo , Sulawesi Selatan) Empowerment of Indigenous People in Development (Indigenous People Case Studies in Battang Palopo City South Sulawesi). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4); 224–234.
- Norsidi. 2019. Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Lubuk Beringin. *Jurnal Sosial Horizon* 6 (1); 38-52.
- Ohorella S, Suharjito D dan Ichwandi I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17(2): 49-55.
- Oktoyoki H. 2016. Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 3 No.1.
- Pratiwi R, Nitibaskara TU, Salampessy ML. 2019. Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan

- Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Jurnal Belantara*. Vol. 2, No.1. DOI: <https://doi.org/10.29303/jbl.v2i1.131>
- Salampessy, M. L. dan I. L. 2017. Potensi Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Daerah Aliran SungaiI (Studi Kasus di Desa Cemplang, sub Das Ciaten Hulu Timur DAS Cisadane). *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 113–119.
- Schmid, A. 1987. Property, Power, and Public Choice CHAPTER 9.
- Singarimbun, M; E, Sofyan. 2006. Metode Penelitian survey. Ed. Jakarta. LP3ES.
- Suardi, O. P. D. I., Darmawan, D. P., & Sarjana, I. D. G. R. 2016. Potensi dan Peran Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 4(1); 1–9.
- Sugiyono. 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan RD. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo ESH. 2014. Analisis Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah. Institut Pertanian Bogor.
- Zulkarnain, A., & Febrimansyah. 2008. Kearifan Lokal dan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, 69-85.